

IMPLEMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH

Fariaman Laia¹, Klaudius Ilkam Hulu², Fianusman Laia^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹fariamanlaia35@gmail.com, ²klaudiusilkamhulu@gmail.com, ³fianusmanlaia@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam hal jual beli tanah merupakan hal yang biasa yang mudah dikenal oleh setiap masyarakat banyak, namun disisi lain yang harus diperhatikan bahwa jual beli tanah harus melihat kelengkapan berkas dari penjual supaya dapat terlihat bukti akta otentik dari sertifikat atau surat yang dikeluarkan oleh PPAT, untuk menghindari personal hukum dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). PPAT bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum bahwa pertanggungjawaban sebagai profesi PPAT, dalam pembuatan akta jual beli, seorang PPAT diharapkan serta diharuskan untuk lebih-hati hati dan melakukan penerbitan akta jual beli dengan tidak mengabaikan standarisasi penerbitan akta jual beli.

Kata Kunci: Implementasi; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Akta Jual Beli.

Abstract

In terms of buying and selling land, it is a common thing that is easily recognized by every community, but on the other hand, it must be noted that buying and selling land must see the completeness of the seller's files so that evidence of an authentic deed can be seen from the certificate or letter issued by the PPAT, to avoid legal personal in the future. This study aims to determine the implementation of the legal responsibility of land deed making officials in making land sale and purchase deeds. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that by carrying out the sale and purchase before the PPAT, clear requirements are met (not dark legal acts, which are carried out secretly). The PPAT is responsible for checking the requirements for the validity of legal acts that the responsibility as a PPAT profession, in making a sale and purchase deed, a PPAT is expected and required to be more careful and issue a sale and purchase deed without ignoring the standardization of the issuance of a sale and purchase deed.

Keywords: Implementation; Land Deed Making Official; Sale and Purchase Deed

A. Pendahuluan

Sebagai Negara hukum suda pasti

setiap warga negaranya harus taat terhadap hukum yang berlaku dan juga

pada penerapan hukum itu sendiri harus memperhatikan *equality before the law* sebagai acuan dalam menghadapi persoalan didalam hukum sehingga dapat diperhatikan hal-hal yang dialami oleh setiap masyarakat itu sendiri, tentu dalam hal jual beli tanah ini merupakan hal yang sangat signifikan ditengah-tengah masyarakat disisi lain ada hal yang lebih penting yang harus diperhatikan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, jika suatu saat terjadi masalah maka terkait dengan bukti kepemilikan maka dapat dilihat pejabat mana yang membuat sertifikat tanah tersebut untuk mempertanggungjawabkan didepan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta-akta tanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga bisa diperlukan dalam keperluan bukti tertulis yang menjadi hukum berupa akta otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Sebagai pejabat negara, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diberi kewenangan untuk mengeluarkan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, salah satu kewenangan PPAT adalah membuat akta jual beli tanah. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang melakukan jual beli dibawah tangan. Hal ini di karenakan

masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan hukum adat setempat. Tentu, dalam pembuatan akta jual beli dibawah tangan ini tidak memiliki kepastian hukum dan pembuktiannya tidak mengikat. Keotentikan akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT dalam pembuatannya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara, akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila dibuat pada dalam bentuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dibuat dihadapan para pihak atau pejabat yang berwenang sesuai dengan lokasi kedudukan akta yang dibuat, Vivin Pomantow:2018:90). Meskipun sama-sama berwenang membuat dan menerbitkan akta otentik, namun payung hukum kewenangan kedua pejabat tersebut berbeda. Kewenangan notaris mengaju pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan PPAT kewenangan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta otentik yang dibuat oleh PPAT merupakan tanda bukti kepemilikan yang dapat menjamin kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa.

Selain itu, akta otentik merupakan instrumen perlindungan hukum bagi pemilikinya. Seiring dengan perkembangan dengan banyaknya sengketa, masyarakat sudah menyadari pentingnya legalitas dalam proses pembuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan dan

kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dalam bentuk akta otentik. Kesadaran masyarakat membuat akta di hadapan pejabat yang berwenang menunjukkan masyarakat telah sadar bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian terhadap objek yang dimilikinya dibutuhkan alat bukti berupa akta. Akta dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Tujuannya dibuat akta tidak lain agar menghindari atau meminimalisir terjadinya hubungan hukum yang bermasalah atau cacat dapat merugikan subjek hukum maupun masyarakat, (Anke Dwi Saputro:2009:15). Dalam dunia pekerjaan notaris dituntut untuk bekerja dengan secara profesional dan penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik dengan baik dan tanpa adanya keberpihakan sesuai dengan koridor standar pelayanan jabatan yang telah diatur dalam UUJN yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kode etik notaris (Habib Adjie: 2015:10).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jabatan sebagai notaris timbul karena adanya faktor kebutuhan dari masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang saling membutuhkan adanya suatu alat bukti perihal hubungan hukum yang bersifat keperdataan di antara mereka, (L. Umban Tobing:1996:30). Keberadaan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta memang dituntut berlaku baik dan benar yang artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan

permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya dan tidak mengada-ada atas akta yang dibuatnya serta harus menjelaskan atau membacakan isi akta sesuai maksud yang disepakati kedua belah pihak, (Ismantoro Dwi Yuwono:2013:195). Dalam praktek dilapangan seringkali ditemukan hal-hal yang memang ditemui adanya pelayanan PPAT dalam memberikan jasa kepada masyarakat adakalanya tidak memuaskan karena berbagai hal yang mengakibatkan banyak ditemukan PPAT di laporkan oleh klien mereka sendiri kepada lembaga kode etik profesi bahkan ada yang melaporkan dengan menempuh jalur hukum baik itu perdata dan pidana. Apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN notaris dalam melaksanakan tugas berkaitan pembuatan akta yang menjadi kewenangannya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, seksama dalam mengambil keputusan, dan mengedepankan sikap kemandirian dalam menjalankan tugas yang diemban dan tidak perbuatan hukum.

PPAT selaku pejabat umum wajib bekerja dengan penuh tanggungjawab dan mengabdikan dalam memberi jasa pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut penerbitan akta otentik kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. PPAT sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT umum, PPAT khusus, dan PPAT sementara. PPAT khusus adalah pejabat yang ditunjuk karena yang bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan tugas pemerintah. Sedangkan PPAT sementara merupakan pejabat yang

melaksanakan tugas untuk membuat PPAT di daerah yang belum terdapat PPAT. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pendaftaran tanah, maka jual beli juga harus dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat akta. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subjek dari tanah yang akan dibelinya itu, serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua saksi. Dalam fungsi dan tanggungjawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah, PPAT bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat sah nya perbuatan hukum, adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai prosedur maka PPAT harus bertanggungjawab terhadap dokumen yang dibuat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hukum pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli tanah?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan

data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Laia, F. (2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas tanah rumah susun. Perbuatan-perbuatan hukum yang menjadi kewenangan PPAT meliputi:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan;
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; dan
- g. Pemberian hak tanggungan.

Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta PPAT adalah perbuatan hukum antara subjek hukum, yaitu:

- a. Antara orang dengan orang;
- b. Antara orang dengan badan hukum;
- c. Antara badan hukum dengan badan hukum.

Didalam menjalankan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka PPAT tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya akta otentik menurut undang- undang maupun yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sepanjang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diharuskan dalam pembuatan akta otentik telah terpenuhi sebagaimana mestinya maka PPAT telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawab berdasarkan amanat yang diberikan kepadanya.

Pertanggungjawaban PPAT dalam Pembelian Jual Beli Tanah Tanggungjawab Secara Etika

Terhadap profesi PPAT dalam memberikan pelayanan harus profesional, profesional itu bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri sendiri artinya PPAT bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban, bukan sekedar karena hobi atau untuk mencari keuntungan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif untuk

mencari keuntungan, melainkan juga kepada sesama manusia. Bertanggungjawab juga berarti berani menanggung secara resiko yang timbul akibat pelayanan itu (Abdulkadir Muhammad: 1998:60). Dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang mengoreksi pelanggaran kode etik. Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya dimana nilai moral merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Frans Magnis Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi:

- a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi; dan
- c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Suatu profesi apapun terkait dengan etika atau moral yang melandasi perbuatan atau tingkah laku sehari-hari dalam menjalankan tugas profesinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang PPAT merupakan seseorang yang menjalankan tugas jabatannya dalam bidang tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam hal pembuatan akta yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan atas dasar kepercayaan yang tugasnya adalah mengutamakan melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya dari pada kepentingan diri sendiri. Ketentuan kode etik profesi PPAT ini secara garis besar mengatur mengenai kewajiban ataupun larangan serta sanksi

yang dapat diberikan kepada PPAT apabila ketentuan dilanggar oleh yang bersangkutan. Di dalam penerapan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran, dimana ketentuan kode etik wajib dilaksanakan oleh setiap profesi yang membuat akta. Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang PPAT di dalam menjalankan tugas dan profesi memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri yaitu etika di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab Secara Hukum

Pada dasarnya tanggungjawab PPAT secara hukum, dapat dikatakan tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang PPAT dalam melayani kliennya yang meminta jasa pelayanannya untuk membuat akta terkait dengan kewajiban PPAT yang bersangkutan dalam hal menerima pembuatan akta yaitu kewajibannya sesudah dan sebelum membuat akta. Mengenai kewajiban PPAT secara hukum dalam membuat akta jual beli dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun kewajiban PPAT sebelum membuat akta tanah, yaitu: Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pembuatan atau pembebanan hak atas tanah atau hak atas milik atas satuan rumah susun PPAT

wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan dengan yang ada didaftar kantor pertanahan nasional dengan memperlihatkan yang asli.

Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pembebanan atau pemindahan hak atas tanah atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis dilakukan pemerintah sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang, (Boedi Harsono:2002:625). tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu (Muammar Himawan: 2004:38). Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber

daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan secara organisasional merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Dalam suatu kewenangan dilekatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi (Prajudi Admosudirjo: 2001:4).

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu:

1. PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf, terdiri atas:
 - a. Diberhentikan dengan hormat;
 - b. Diberhentikan dengan tidak

- hormat; dan
- c. Diberhentikan sementara.
2. PPAT diberhentikan
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan menteri/kepala atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
 - f. PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena;
 - g. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau
 - h. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
3. PPAT diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana huruf c, karena:
 - a. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara paling lama

- 5 tahun atau lebih berat;
- b. Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah;
 - c. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
 - d. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota yang lain dari pada tempat kedudukan sebagai PPAT;
 - e. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - f. Berada di bawah pengampunan; dan/atau
 - g. Melakukan perbuatan tercela.
4. PPAT yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 5. Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.
 6. PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT.

Dari uraian penjelasan pembahasan diatas, mengenai pertanggungjawaban PPAT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam profesi membuat akta jual beli yang melanggar aturan

hanya dikenakan sanksi administrasi. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 secara normatif pertanggungjawaban PPAT secara pidana tidak dijelaskan tentang sanksi pidana. Akan tetapi, seorang PPAT yang membuat akta jual beli tanah yang melanggar aturan hukum hanya dibebankan masalah kode etik administrasi dan tidak ada pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada PPAT yang telah salah melaksanakan akta jual beli.

Implementasi Hukum Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Dalam hal implementasi hukum ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam menjalankan apa yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang PPAT dalam melakukan suatu kegiatan administrasi sehubungan dengan jabatannya supaya apa yang dilakukan sekarang ini bisa menjadi acuan dalam pembuatan akta tanah. Tanggung jawab utama PPAT secara khusus membuat serta mengesahkan perbuatan hukum ke dalam Akta PPAT atas perbuatan hukum tentang (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2007:13):

- a. Peralihan dan pembebanan hak atas tanah maupun hak atas satuan rumah susun; dan
- b. Pemberian kuasa pembebanan hak cara pemberhentian PPAT diat dengan peraturan menteri.

Kewenangan melakukan tugas PPAT tersebut berlaku untuk daerah kewenangan atau sesuai dengan daerah kerja atau wilayah kerja PPAT yang

meliputi satu wilayah provinsi, daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya, yang diatur secara jelas dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas dan prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta otentik dari 8 (delapan) jenis/macam perbuatan hukum hak atas tanah yang merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah, mengenai pembuatan akta peralihan, pembebanan, pemberian kuasa oleh pihak-pihak yang wajib dan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi syarat secara prosedural. Tugas dan kewenangan pembuat akta peralihan hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan (APHT) dahulu dikenal dengan sebutan Akta Hipotek, sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya atau lebih jelas sebelumnya dikenal dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kewenangan tersebut dipercayakan kepada:

- a. Hakim Pengadilan Niaga/Negeri; dan
- b. Notaris selaku Pejabat Umum sesuai KUHPerduta Pasal 1868, yang hingga sekarang pemerintah tidak pernah mencabut kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta tentang pertanahan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPAT

diatur bahwa ketika seorang PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, PPAT dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi Administratif, tetapi tidak mengatur adanya sanksi "Perdata dan Pidana" terhadap PPAT, maka apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi delik perdata dan pidana terhadap PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi perdata yang termuat dalam KUHPerduta dan sanksi pidana yang termuat dalam KUHP.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh PPAT secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah secara tegas tidak mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada PPAT dalam membuat akta jual beli. Sehingga dalam berbagai persoalan yang dihadapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya peraturan perundang-undangan harus lebih konkrit mengaturnya sehingga dalam penerapan hukumnya jelas dalam memberikan implementasi hukumnya dan tidak terlalu berbelit-belit jika suatu saat terjadi persoalan uji materiil dari akta yang dimiliki oleh setiap orang.

E. Daftar Pustaka

Admosudirjo, Prajudi. Teori Kewenangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika

- Aditama, 2015)
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Himawan, Muammar. Pokok-Pokok Organisasi Modern (Jakarta: Bina Ilmu, 2004)
- Laia, F. (2024). Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi. *JURNAL PROFILE HUKUM*, 173-182.
- Prajitno, Andi, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2017)
- Saputro, Anke Dwi. 100 Tahun INI, Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang dan di Masa Mendatang (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)
- Tobing, Lumban. Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1996)
- Yuwono, Ismantoro Dwi. Memahami berbagai Etika profesi dan Pekerjaan (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).